# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/ 0598 /KUM/2018

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA *TAHUN 2019*
DI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa dengan memperhatikan *Rekomendasi* Walikota Banjarmasin tentang Usulan Upah Minimum Kota (UMK) Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 214/06/Diskopumper-PHIJS/XI/2018 tanggal 05 November 2018; Rekomendasi Bupati Kotabaru tentang Usulan Upah Minimum Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 568/1741/SETDA tanggal 31 Oktober 2018; Rekomendasi Bupati Tabalong Nomor B.767/Bup/Naker/058/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dan *Rekomendasi* Bupati Tanah Bumbu *Nomor* 565/753/DISNAKERTRANSKOP&UM/2018 tanggal 14 November 2018;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan perkembangan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan upaya konkrit melalui kenaikan upah yang riil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik* Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik *Indonesia Nomor 4279*);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;

14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);

15. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0570/KUM/2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

| No. | Kabupaten/Kota | Besaran UMK |
|---|---|---|
| 1. | Kota Banjarmasin | Rp2.689.362,00 |
| 2. | Kabupaten Kotabaru | Rp2.796.819,62 |
| 3. | Kabupaten Tabalong | Rp2.739.501,10 |
| 4. | Kabupaten Tanah Bumbu | Rp2.660.000,00 |

KETIGA : Perusahaan dilarang membayar Upah Minimum lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Bagi pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan, upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum dan Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KELIMA : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur ini adalah Upah Minimum bulanan terendah untuk waktu kerja 7 jam sehari atau 40 jam seminggu bagi sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu atau 8 jam sehari atau 40 jam seminggu bagi sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0537/KUM/2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018 di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Nopember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Bupati/Walikota Banjarmasin, Kotabaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu.
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Kalimantan Selatan.
7. Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
8. Ketua APINDO Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
9. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Banjarmasin, Kotabaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu.
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
11. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota Banjarmasin, Kotabaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu.